

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel mengenai pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan jumlah industri manufaktur skala sedang dan besar terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2023, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk, pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, dan jumlah industri manufaktur secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023.
2. Secara parsial, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023. Pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023. Jumlah industri manufaktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023. Adapun variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023.

3. Jumlah penduduk merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023.

B. Implikasi

Berikut beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, yaitu:

1. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk banyak cenderung memiliki distribusi ekonomi yang lebih merata, terutama jika didukung oleh produktivitas yang tinggi dan akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, potensi demografi dapat menjadi kekuatan produktif yang menurunkan ketimpangan apabila dikelola dengan baik.

Implikasinya, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan yang mampu mengoptimalkan jumlah penduduk sebagai aset pembangunan ekonomi. Untuk itu, kebijakan konkret yang dapat ditempuh meliputi: (1) penyusunan blueprint pembangunan sumber daya manusia berbasis potensi lokal oleh pemerintah daerah, (2) pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan di wilayah berpenduduk besar, dan (3) perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis produktivitas agar bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong partisipasi ekonomi. Hasil bahwa jumlah pengangguran terbuka (JPT) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ketimpangan mengindikasikan bahwa wilayah dengan jumlah pengangguran yang tinggi cenderung mengalami ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah untuk menurunkan pengangguran secara spesifik di daerah-daerah tertinggal, melalui penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, penguatan UMKM, serta pelatihan dan pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, kolaborasi antara sektor pendidikan dan dunia kerja harus ditingkatkan agar lulusan pendidikan dapat terserap secara optimal di wilayah masing-masing.

2. Jumlah pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran memperburuk disparitas pembangunan antar wilayah. Daerah dengan pengangguran tinggi cenderung tertinggal dalam capaian ekonominya, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan.

Implikasinya, intervensi kebijakan harus bersifat spesifik dan berbasis wilayah, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik lokal. Saran kebijakan yang relevan mencakup: (1) penyusunan roadmap pengurangan pengangguran oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan potensi sektor unggulan masing-masing wilayah; (2) pengembangan program padat karya tunai berkelanjutan oleh pemerintah pusat di daerah dengan JPT tinggi; (3) pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas dengan kurikulum adaptif terhadap permintaan industri lokal;

serta (4) penguatan kolaborasi antara SMK dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) melalui program pemagangan dan perjanjian kerja sama formal.

3. Jumlah industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, menunjukkan bahwa semakin banyak industri yang tersebar di suatu daerah, semakin kecil tingkat disparitas pembangunan antar wilayah. Keberadaan industri mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Daerah dengan konsentrasi industri yang tinggi cenderung mengalami akselerasi pembangunan, yang turut mempersempit kesenjangan antar wilayah.

Implikasinya, kebijakan pembangunan industri harus diarahkan secara terfokus dan berbasis potensi lokal, dengan tujuan mendorong pemerataan ekonomi melalui distribusi industri yang lebih merata. Saran kebijakan yang relevan mencakup: (1) Penyusunan peta sebaran dan potensi pengembangan industri oleh pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan ketersediaan sumber daya lokal; (2) Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal oleh pemerintah pusat untuk mendorong investasi industri di wilayah tertinggal, seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan subsidi infrastruktur; (3) Pengembangan kawasan industri terpadu skala kecil dan menengah di daerah non-metropolitan, yang dapat menampung pelaku usaha lokal dan mendorong pertumbuhan UMKM berbasis industri; dan (4) Fasilitasi kemitraan antara industri besar dan pelaku usaha lokal, melalui skema

industrial linkage yang mendorong transfer teknologi, pembinaan SDM, dan akses pasar.

